

## DOMINASI PERTARUNGAN SIMBOLIK IDEOLOGI NADIEM MAKARIM: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH

Anggi Pratama<sup>1)</sup>, Susandi<sup>2)</sup>, Yunita Anas Sriwulandari<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Budi Utomo Malang

Jalan Citandui No. 46 Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

E-mail: [anggi1@gmail.com](mailto:anggi1@gmail.com), [susandi.ikipbudiutomo@gmail.com](mailto:susandi.ikipbudiutomo@gmail.com), [cikyun2906@gmail.com](mailto:cikyun2906@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fitur lingual kosakata aspek deskripsi dan mode wacana kebahasaan dalam bentuk kekerasan simbolik penggunaan bahasa berdasarkan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang terdapat dalam ideologi Nadiem Makarim pada Instagram Live Prilly Latuconsina Bareng Mendikbud Ristek - Nadiem Makarim 31 Maret 2022. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan berupa kutipan transkripsi teks hasil rekaman video dialogis dengan menggunakan teknik pengumpulan data teknik catat, teknik simak bebas libat cakap, dan teknik rekam. Penelitian ini menggunakan tiga tahap teknik analisis data antara lain (1) mereduksi data; (2) menyajikan data; (3) penarikan simpulan dan verifikasi data. Penelitian ini menghasilkan: (1) Proses leksikal terjadi pada kata "Mas Menteri", "Dana Indonesiana" dan "Kurikulum Merdeka"; (2) Pertarungan simbolik ketiga kata tersebut muncul dalam bentuk kekuatan dalam pemberian nama yang diakui secara resmi (pelabelan), monopoli visi, pemaksaan pandangan dan tindakan, dan pengontrol persepsi; (3) Mode wacana kebahasaan ketiga kata tersebut termasuk dalam persuasif agresif-dogmatis dan derajat kekuatan persuasi, kata "mas menteri" muncul sebanyak 36 kali, kata "dana" muncul sebanyak 22 kali yang merepresentasikan tentang dana anggaran abadi bernama "Dana Indonesiana", kata "kurikulum" muncul sebanyak 10 kali, kata "merdeka" muncul sebanyak 11 kali, kata-kata tersebut telah memunculkan empat pertarungan simbolik secara leksikal yang mengandung makna eksperiensial dan mengandung makna istilah yang berpotensi memiliki makna tunggal bercorak agresif-dogmatis serta memiliki kekuatan derajat persuasi dalam penggunaan kata.

**Kata Kunci:** Mode Wacana Kebahasaan; Norman Fairclough; Pertarungan Simbolik; Proses Leksikal.

## NADIEM MAKARIM'S IDEOLOGICAL SYMBOLIC FIGHT DOMINATION: NORMAN FAIRCLOUGH'S CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

### Abstract

*This research was conducted to determine the lingual features of vocabulary description aspects and modes of linguistic discourse in the form of symbolic violence using language based on Norman Fairclough's critical discourse analysis contained in Nadiem Makarim's ideology on Instagram Live Prilly Latuconsina with Mendikbud, Research and Technology - Nadiem Makarim March 31, 2022. The approach used is a descriptive-qualitative approach. The data used are in the form of text transcription excerpts from dialogical video recordings using data collection techniques, note-taking techniques, free-of-conversation listening techniques, and recording techniques. This study uses three stages of data analysis techniques, including (1) data reduction; (2) presenting data; (3) drawing conclusions, and verifying data. This study resulted in: (1) The lexical process occurred in the words "Mas Minister", "Dana Indonesiana" and "Kurikulum Merdeka"; (2) The symbolic struggle of the three words appears in the form of power in officially recognized names (labeling), monopoly of vision, coercion of views and actions, and perception control; (3) The mode of linguistic discourse of the three words includes dogmatic-aggressive persuasion and the degree of power of persuasion, the word "mas minister" appears 36 times, the word "dana" appears 22 times which represents an enduring budget fund named "Dana Indonesiana", the word "curriculum" appears 10 times, the word "merdeka" appears 11 times, these words have given rise to four lexical symbolic battles that contain experiential meanings and contain the meaning of terms that have the potential to have a single meaning with an aggressive-dogmatic pattern and have a degree of power. persuasion in the use of words.*

**Keywords:** Linguistic Discourse Mode; Norman Fairclough; Symbolic Battle; Lexical Processes.

## 1. PENDAHULUAN

Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat interaksi dan komunikasi di kalangan masyarakat. Menurut Fairclough (2001), bahasa menjadi media perantara dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi. Badara (2012) menambahkan bahwa bahasa mendeskripsikan tentang bagaimana realitas dunia ini dilihat, yang memungkinkan seseorang mengontrol pengalaman dalam realitas social (Hasanah & Mardikantoro, 2017). Selain itu, bahasa juga menjadi penyumbang proses dominasi terhadap orang lain oleh pihak lain. (Kuntarto, 2018) Penggunaan bahasa di kalangan dominan digunakan sebagai sarana diskusi kelompok dan kelas tertentu yang berusaha untuk menyampaikan keyakinan dan pemahaman mereka. Selain itu, Pecheux, mengutip Althusser, menekankan bagaimana seseorang ditempatkan pada posisi fiktif atau formasi diskursif dalam praktik umum hegemoni dalam masyarakat. (Mubaligh, 2011);(Kuntarto, 2018). Dalam praktiknya, bahasa dikemas dengan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dikenali dan dirasakan. Pada akhirnya, praktik dominasi masuk ke dalam diri konsumen teks dan dianggap sebagai kebenaran umum. Proses inilah yang dimaksud dengan dominasi dan secara tak kasat mata disebut dengan kekerasan simbolik yang tersirat (Santoso, 2019).

Bagi kaum pascastrukturalis, bahasa digunakan dan diartikulasikan sebagai praktik budaya dan praktik sosial. Bentuk kekerasan simbolik ini tampak ketika terjadi dialogis antara modus penggunaan bahasa yang satu bertemu dengan penggunaan bahasa yang lain. Dalam konteks inilah, bahasa tidak dipahami lagi sebagai language lagi, melainkan sebagai wacana yang muncul dalam realita kehidupan kita sebagai budaya sosial. Wacana telah menjadi wadah bagi suatu institusi dalam memperoleh kekuasaan melalui proses definisi dan eksklusivitas. Analisis wacana melihat penggunaan bahasa lisan

dan tulisan sebagai praktik sosial (Hasibuan & Khairani, 2021). Menurut pandangan Bourdieu, sebagai praktik sosial, bahasa memberikan gambaran hidup sosial dan secara esensial memberikan gambaran agar tujuannya tercapai (Santoso, 2019).

Menariknya, tokoh-tokoh hegemonik di Indonesia menggunakan bahasa tidak hanya untuk mengekspresikan pikiran, pendapat, atau gagasannya, tetapi juga untuk mengkomunikasikan gagasan yang melibatkan kepentingan kuat yang harus dilindungi dengan cara apapun. Dalam praktiknya, setiap rezim-rezim pemerintahan dan kelompok instansi menggunakan repertoar yang berbeda-beda sehingga karakter bahasa di antara mereka juga bervariasi sesuai dengan konteks sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Bourdieu (1990 dan 1998) mengemukakan bahwa kekerasan simbolik adalah kekerasan halus atau lembut. Disebut kekerasan halus atau lembut karena bentuknya tidak jelas, sehingga tidak tampak sebagai kekerasan, disembunyikan atau disamarkan oleh doktrin, kesetiaan, hadiah, pengakuan, balas budi atau etika kehormatan (Wahyuni et al., 2019).

Dikutip dari Hikam (1996:80), ia mengatakan *"Setiap pernyataan adalah tindakan "penciptaan makna", yaitu tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari sang pembicara"*. Kemudian, Hikam (dalam Yudi Latif, 1996:77) menegaskan bahwa bahasa dan praktik bahasa tidak lagi dipahami dalam konteks perspektif konvensional, yakni sebagai alat dan instrumen netral yang digunakan untuk menjelaskan realitas sosial politik. Namun, semakin dipahami bahwa bahasa itu sendiri muncul sebagai representasi dari berbagai kekuatan dan sebagai ruang untuk penggunaannya dan bahasa digunakan sebagai salah satu praktik kekuasaan yang dominan di media sosial (Hasibuan & Khairani, 2021). Oleh karena itu, bahasa dipandang sebagai ruang di mana konflik kepentingan, kekuasaan, proses hegemonik, dan kontra-hegemoni yang berbeda

muncul (Hendrajati, 2009). Penggunaan bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan menunjukkan bahwa bahasa merupakan modal sosial yang menentukan kemampuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana digambarkan oleh Thomas Stamford Raffles, penggunaan bahasa sebagai sarana keuntungan politik, sosial dan ekonomi juga digunakan oleh para pendukung aliran sofisme, menjelaskan penggunaan bahasa sebagai modal sosial oleh para pendukung bahasa penganut mazhab tersebut (Sofyan, 2014). Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan Bourdieu (2003) menambahkan bahwa sekolah, perguruan tinggi, dan keluarga adalah lembaga pembelajaran yang memainkan peran paling penting dalam membentuk sifat masyarakat (Jafar, 2015). Selain itu, Antonio (1971) mengatakan bahwa supremasi kekuasaan tidak hanya diperjuangkan oleh angkatan bersenjata tetapi juga dengan penerimaan khalayak umum (Hasibuan & Khairani, 2021).

Dengan munculnya pertarungan dan kekuasaan simbolik dan berujung pada kekerasan simbolik inilah pelabelan terbentuk praktik dominasi tersebut. Mengutip pandangan Bourdieu (1991) bahwa pelabelan terhadap sebuah praktik dominasi juga akan terbentuk dan selalu ada kekuatan untuk memberikan nama yang diakui secara formal, untuk memonopoli pandangan yang sah tentang dunia sosial dan memaksakan pandangan satu kelompok pada kelompok lain.. Kekuasaan simbolik ini akan muncul dengan instrumen-instrumen pemaksa terhadap kelompok subordinat dan marginal yang turut berperan dalam memproduksi tatanan sosial sesuai dengan keinginan kelompok dominan (Santoso, 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pertarungan wacana seseorang selalu berusaha mengakumulasi modal simbolik untuk mencapai kekuatan simbolik. Dengan kata lain, tujuan dari perjuangan simbolik yang sedang berlangsung

adalah untuk memperjuangkan kekuatan makna yang sah (Winarsih, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian tentang penggunaan bahasa dan kekerasan simbolik perlu dilakukan. Melalui analisis wacana kritis dengan kajian fitur lingual kosakata deskripsi dan mode kebahasaan Norman Fairclough. Menurut Halliday dan Hasan (1976), teks (wacana) juga harus dipahami sebagai unit semantik, bukan sebagai unit gramatikal (seperti morfem, kata, frasa, atau kalimat) (Sukriyah et al., 2018). Penelitian ini diharapkan dapat diketahui kaitan antara bahasa dan kekuasaan, praktik penggunaan bahasa berlatar belakang ideologis dan filosofis dalam berbicara dalam bahasa asli atau ragam bahasa yang berbeda oleh repertoar yaitu antara Nadiem Makarim dan Prilly Latuconsina saat melakukan *Instagram Live* 31 Maret 2022.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menganalisa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka selanjutnya menjabarkannya dalam bentuk tulisan. Penelitian ini berfokus pada analisis wacana kritis yang terdapat dalam *Instagram Live* Prilly Latuconsina Bareng Mendikbud Ristek - Nadiem Makarim 31 Maret 2022. Peneliti menggunakan metode simak untuk pengumpulan data. Metode simak yang digunakan yaitu teknik catat, teknik simak bebas libat cakap, dan teknik rekam. Pada teknik simak bebas libat cakap, peneliti hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pembicara dan tidak terlibat di dalam percakapan (Tambunan, 2022). Kemudian, peneliti melakukan teknik catat dan rekam untuk menunjang keakuratan data.

Kemudian, data dianalisis menggunakan teori analisis wacana sintagmatis dengan konsep analisis Norman Fairclough yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian pada fitur linguistik kosakata aspek deskripsi yang dibatasi pada proses leksikal saja. Penerapan metode analisis

naskah sintagmatik ini pada dasarnya sama yaitu membaca atau menafsirkan makna implisit dan eksplisit teks kalimat per kalimat, memperhatikan hubungan bagian-bagian dalam kalimat, paragraf, bait, frase, baik yang bersifat konjungsi (*conjunction*), berlawanan (*oppositional*) dan seterusnya. Alat pendefinisian penelitian ini adalah kata, fungsi sintaksis (subjek, objek, predikat), klausa, benda atau tindakan di luar bahasa, dan ekspresi serta objek atau fungsi nonlinguistik lainnya (Zaim, 2014).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam percakapan antara PL dan NM terdapat aspek eksperiensial yang merepresentasikan tentang dana anggaran berupa dana abadi bernama “Dana Indonesiana” dan kurikulum merdeka yang berkaitan tentang jurusan multidisipliner. Kata eksperiensial yang dimaksud

dalam hal ini adalah suatu aspek formal yang menjadi sebuah tanda atau isyarat yang membuat pengalaman lingkungan alam atau sosial dunia yang diwakili oleh penulis teks. Makna eksperiensial ini berkaitan dengan isi, pengetahuan dan keyakinan (Fairclough, 2013). Kata “mas menteri” muncul sebanyak 36 kali, kata “dana” muncul sebanyak 22 kali yang merepresentasikan tentang dana anggaran abadi bernama “Dana Indonesiana”, kata “kurikulum” muncul sebanyak 10 kali, kata “merdeka” muncul sebanyak 11 kali. Kata tersebut telah memunculkan empat pertarungan simbolik secara leksikal yang mengandung makna eksperiensial, antara lain (1) kekuatan dalam pemberian nama yang diakui secara resmi/pelabelan, (2) monopoli visi yang sah, (3) pemaksaan pandangan dan tindakan, dan (4) pengontrol persepsi.

**Tabel 1. Keterlibatan Fitur Lingual dengan Pertarungan Simbolik dan Mode Wacana Kebahasaan**

Aspek Linguistik	Fitur Lingual Aspek Deskripsi	Pertarungan Simbolik (PS)	Mode Wacana Kebahasaan
Kosakata	Proses-proses leksikal: (i) pola klasifikasi yang tergambar dalam teks. (ii) kata-kata ideologis yang diperjuangkan, (iii) leksikalisasi, (iv) kekurangan leksikal, dan (v) kelebihan leksikal. <i>Rewording</i> (pengungkapan sesuatu dengan kata-kata): penyusunan kata yang ada, dominan dan natural. Konteks subversif dan solidaritas dalam konteks ideologi yang menganut paham “kanan” dan “paham kiri”	a. Kekuatan pemberian nama yang diakui secara resmi (PS-1) b. Monopoli visi yang sah (PS-2) c. Pemaksaan pandangan dan tindakan (PS-3) d. Pengontrol persepsi (PS-4)	a. Persuasi bercorak agresif-dogmatis. (WK-1) b. Persuasi yang menunjukkan derajat kekuatan persuasi. (WK-2)

#### A. Proses Leksikal

##### 1. Kata “Mas” dalam “Mas Menteri”

Kata “Mas” yang menyertai kata “Menteri” yang telah menjadi nama panggilan atau sapaan Nadiem Makarim, secara tidak langsung terbentuk secara leksikal sebagai kata majemuk yang menunjukkan sebuah sosok penting dalam jabatan pemerintahan, tapi tidak meninggalkan kesan akrab dalam perbincangan.

(1) PL: ..... *Hari ini aku akan berdiskusi dengan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim tentang banyak hal tapi pastinya seputar film, seputar*

*KEMENDIKBUDRISTEK dan banyak hal lainnya.... langsung aja kita undang mas menterinya kira-kira mas menterinya sudah gabung belum ya? Halo Mas Menteri.....*

Biasanya secara kultur di Indonesia, kata “mas” dalam KBBi merupakan kata sapaan untuk saudara tua laki-laki atau laki-laki yang dianggap lebih tua, kata sapaan hormat untuk laki-laki, tanpa memandang usia dan panggilan karib istri kepada suami. Umur NM yang cukup muda yaitu 37 tahun, lebih akrab dipanggil “Mas Menteri” ketika tidak berada dalam sebuah lingkungan

formal kenegaraan yang menjadi kata majemuk khusus bagi NM dan hal ini tidak ditujukan kepada menteri yang lain walaupun memiliki umur yang sama dengan NM. Hal ini memiliki makna dari sisi penghormatan bahwa PL juga menggunakan cara yang sama ketika berbincang dengan sosok menteri ini.

Aspek eksperiensial dari kata “menteri” disini memiliki tujuan bahwa lawan bicara PL adalah seorang menteri yang memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan pemerintahan. Hal ini membuat sebuah doktrin bagi masyarakat untuk diikuti hasil dari kebijakannya agar masyarakat juga selaras dengan apa yang menjadi tujuan kebijakannya. PL tidak menyebut nama “Bapak Nadiem Makarjem” tetapi lebih memilih “Mas Menteri” yang diidentikan kepada Menteri KEMDIKBUD saat ini. Kelebihan dari leksikal ini adalah orang yang menggunakan kata tersebut terkesan akrab dan tidak terpaku pada posisi jabatan narasumber dan leksikalisasi yang dipilih juga sesuai dengan keberadaan sosok menteri muda yang memiliki program pendidikan dalam pemerintahan. Selain itu, kata “Mas Menteri” akan selalu dijadikan sebagai gelar nonformal dan atribut khusus bagi NM selama menjabat sebagai menteri yang tidak dapat tergantikan atau dilimpahkan kepada menteri lainnya.

## 2. Proses leksikal pada kata “Kurikulum”

Kata “kurikulum” yang muncul sebanyak 10 kali dan kata “merdeka” yang muncul sebanyak 11 kali, sebenarnya merupakan suatu program dari NM sehingga menjadi kata majemuk “kurikulum merdeka”.

(25) NM: .....salah satu hal yang sangat penting di dalam perubahan **kurikulum** misalnya kita baru meluncurkan **kurikulum merdeka** adalah untuk menyisakan waktu sangat besar untuk *Project Based Learning* gitu. ....

Secara leksikal dalam KBBI, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan seperangkat mata pelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran keahlian khusus, sedangkan merdeka artinya bebas (dari

perbudakan, penjajahan, dll), merdeka, tidak terpengaruh atau bebas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu, bebas, merdeka (dapat melakukan apa yang diinginkannya). Kata tersebut kemudian digabung sehingga menjadi kata majemuk “kurikulum merdeka” yang berarti kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan minat dan keterampilan anak sejak usia dini, dengan fokus pada materi penting, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa.. Dalam hal ini, kurikulum merdeka merujuk pada kata “*skill* atau kemampuan” yang terucap sebanyak 12 kata.

NM menyusun kurikulum ini sebagai langkah untuk membebaskan pembelajaran dari belenggu administrasi dan ketidaksesuaian pembelajaran yang bersifat teori dengan aplikasi. Kekuasaan NM sebagai menteri dengan menawarkan kebebasan lembaga pendidikan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan peserta didiknya. Leksikalisasi kata “kurikulum merdeka” merupakan hasil dari pemikiran untuk membebaskan ide dan gagasan bagi peserta didik, guru dan sekolah. Hal ini dikarenakan, setiap lima tahun sekali, menteri pendidikan selalu menyusun kurikulum yang harus diterapkan pada sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum yang disusun oleh NM ini memiliki keyakinan bahwa peserta didik perlu dibimbing secara skill untuk mendapatkan minat mereka dan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan mereka secara multidisipliner keilmuan. Dengan menggunakan kata “kurikulum merdeka”. NM tidak menggunakan kata “kurikulum bebas” atau “kurikulum fleksibel” atau lainnya, karena Indonesia tidak lepas dari kata “merdeka” sehingga peneliti berasumsi bahwa kata “merdeka” lebih familiar untuk dikenal oleh masyarakat sehingga lebih bisa dipahami apa tujuan dibentuknya kurikulum ini. Selain itu, kata “kurikulum merdeka” juga menunjukkan bahwa dari sisi ideologi, kurikulum ini adalah hasil prakarsa NM selama menjabat menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Kelebihan leksikal

dari kata “kurikulum merdeka” juga mudah diingat dan tidak perlu adanya singkatan seperti KBK, KTSP, dan kurikulum sebelumnya yang perlu diejawantahkan.

### 3. Proses leksikal pada kata “dana” dalam “Dana Indonesiana”

Kata “dana” muncul pada teks ujaran nomor (17) berikut.

(17) NM: *Iya pastinya ya kalau klub dunia perfilman juga ini suatu hal yang saya dari kecil itu udah-udah lumayan terlibat gitu di dunia perfilman kan Kakak saya di dunia perfilman banyak teman-teman keluarga saya ada di dunia perfilman. Jadi saya kecil waktu saya umur 20-an, saya kerjain kayak apa penerjemahan ke bahasa Inggris buat film-film Indonesia sempat iya....Jadi saya excited sekali nih sekarang, ini makanya salah satu yang bikin Saya senang banget dan excited adalah kita baru aja nih kemarin meluncurkan episode Merdeka belajar dan dana Abadi kebudayaan dan namanya ya namanya “Dana Indonesiana”.*

Teks tersebut telah memancing NM untuk memulai inti dari pembahasan awal terkait perfilman Indonesia. NM juga memberikan gambaran terkait hal itu dengan memberikan jawaban lebih mendalam yang disesuaikan dengan konteks yang ada di Indonesia.

Kemudian, NM mengawali inti pembicaraan terkait dana abadi “Dana Indonesiana” yang merupakan awal topik pembicaraan. Topik pembicaraan yang kedua ini tidak terlepas dari topik awal tentang film karena hasil ideologi dan kekuasaan seorang NM dalam pemerintahan akan memberikan gambaran tentang gagasannya sebagai menteri dalam bentuk bantuan atau solusi bagi para seniman atau budayawan yang membutuhkan dana besar untuk memproduksi suatu karya.

(20) PL: *Dan saya terima kasih sekali Mas Menteri Terima kasih sudah ada “Dana Indonesiana” karena dengan adanya “Dana Indonesiana” ini produser-produser muda yang punya ide luar biasa punya kreativitas luar biasa tapi mereka masih punya ketakutan untuk memproduksi karena keterbatasan dana*

Teks (20) adalah tanggapan atas ideologi yang disesuaikan dengan konteks pembicaraan terkait dana abadi “Dana Indonesiana” sekaligus sebagai proses eksistensial seorang menteri dalam memberikan solusi.

### B. Pertarungan Simbolik dan Mode Wacana Kebahasaan

Menurut (Santoso, 2019), terdapat empat makna pertarungan simbolik yang terdapat dalam sebuah wacana, antara lain:

1. Kekuatan untuk memberi nama yang diakui secara resmi (PS-1).
2. Monopoli visi yang sah (PS-2).
3. Pemaksaan pandangan dan tindakan (PS-3).
4. Pengontrol persepsi (PS-4)

Menurut (Hendrajati, 2009), terdapat dua makna mode wacana kebahasaan, yaitu:

- a. Persuasif agresif-dogmatis (WK-1), yaitu kata-kata dapat diklasifikasikan sebagai agresif-dogmatis karena kata tersebut memiliki kesan pengklasifikasian (definisi), memiliki kepastian (batas), makna atau identitas yang ingin mereka ciptakan. Padahal alur kehidupan manusia akan bergerak dan terus berproses secara personal. Dengan kata “adalah”, maka kata tersebut berpotensi memiliki makna agresif-dogmatis dan politis.
- b. Persuasi bercorak derajat kekuatan persuasi (WK-2) berarti ungkapan pembicara secara semantis berpotensi mendominasi makna dan maksud dalam berkomunikasi.

**Tabel 2. Hasil Pertarungan Simbolik dan Mode Wacana Kebahasaan - NM dan PL**

Fitur Linguistik	Kata atau Frase	Pertarungan Simbolik	Mode Wacana Kebahasaan
Proses Leksikal	Mas Menteri	PS-1	WK-1
		PS-2	WK-2
		PS-3	
		PS-4	
	Dana Indonesia	PS-1	WK-1
		PS-2	WK-2
		PS-3	
		PS-4	

---

	PS-1	WK-1
Kurikulum	PS-2	WK-2
Merdeka	PS-3	
	PS-4	

---

## PEMBAHASAN

### a. Pertarungan Simbolik dan Mode Kebahasaan kata “Mas Menteri”

Kata “Mas Menteri” memiliki kekuatan dalam pemberian nama agar diakui secara resmi (PS-1) karena kata sapaan tersebut hanya dikhususkan untuk Menteri Nadiem Makarim. Hal ini menunjukkan monopoli visi yang sah (PS-2) karena secara leksikal kata tersebut membentuk mode wacana kebahasaan secara persuasif agresif-dogmatis (WK1) dan memunculkan pelabelan bahwa “Mas Menteri” adalah Nadiem Makarim. Mengutip argumen yang dikemukakan oleh Bourdieu (1984:70) bahwa “*What creates the power of words and slogan, a power capable of maintaining or subverting the social order, is the belief in the legitimacy of words and of those who utter them*”. (Yang menciptakan kekuatan kata-kata dan slogan, kekuatan yang mampu mempertahankan atau menumbangkan tatanan sosial, adalah kepercayaan pada legitimasi kata-kata dan orang-orang yang mengucapkannya). (Winarsih, 2013) Hal ini menunjukkan bahwa bentuk PS-1 dan PS-2 sangat relevan dengan argumen di atas. Kemudian, Bourdieu (1984: 166) menambahkan bahwa kekuasaan simbolik merupakan suatu kekuasaan untuk mengonstruksi sebuah realitas melalui tatanan *genoseological*, yaitu pemaknaan yang paling dekat terkait dunia sosial pada suatu kelompok atau orang tertentu. (Winarsih, 2013) Sebutan “Mas Menteri” terhadap sosok Nadiem Makarim menjadi sebuah hal yang sah dan mengajak masyarakat luas untuk menerima pelabelan pada WK-1 tanpa adanya penolakan dari masyarakat.

Sebuah konsep, bahasa, atau wacana dianggap sah bergantung kepada siapa yang mengucapkannya (memproduksi). Dalam ranah politik, jika seseorang atau lembaga mendapatkan otoritas dan legitimasi untuk mengucapkan sesuatu, memproduksi wacana, maka ucapan atau wacana tersebut dianggap sebagai kebenaran. Bentuk pemaksaan pandangan dan tindakan (PS-

3) ini muncul dalam bentuk implikatur yang dilontarkan oleh Nadiem Makarim yaitu pada ujaran (27). Penggunaan implikatur dalam berbahasa meliputi perlbagai pertimbangan seperti memperhalus ujaran, menjaga tata krama atau kesopanan, sindiran halus (tidak langsung), dan menghindari hinaan langsung (Arifianti, 2018).

(27) NM: *Jadi kita ingin kurikulum kita tuh jauh lebih merdeka untuk bisa mengakomodasi skill-skill yang sangat sulit dites, tapi malah lebih penting daripada yang bisa dites gitu loh untuk masa depan mereka.*

Pada ujaran (27) “kita ingin kurikulum kita tuh jauh lebih merdeka untuk bisa mengakomodasi skill-skill yang sangat sulit dites...” secara konteks, NM juga menilai bahwa kurikulum sebelumnya tidak fleksibel dan tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, NM juga menawarkan sebuah program kurikulum merdeka yang lebih mudah untuk diaplikasikan dan lebih menjurus pada skill para peserta didik setelah lulus. NM tidak semata-mata menuding bahwa kurikulum yang sebelumnya itu buruk dan kurang berhasil, tapi secara pemaknaan, NM juga membuat sebuah implikatur percakapan bahwa sebenarnya kurikulum merdeka ini lebih baik daripada kurikulum sebelumnya yang telah diterapkan karena tidak menyulitkan dan sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ankersmit (1987:72) menambahkan bahwa arena perebutan kekuasaan harus dimaknai sebagai upaya untuk memproduksi dan menghadirkan pandangan dunia yang paling akrab, benar dan sah. Semua itu didasarkan pada keinginan untuk memperoleh legitimasi atau pengakuan bahwa hanya pendapat merekalah yang paling sah dibandingkan dengan orang lain. Kekuatan yang membentuk dunia melalui sudut pandangnya yang paling sah disebut kekuatan simbolik. (Winarsih, 2013)

Keberadaan “Mas Menteri” menunjukkan persuasi yang menunjukkan derajat kekuatan persuasi (WK-2) sebagai pemegang ideologi kekuasaan dalam menentukan kebijakan dan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan

tersebut. Kata “Mas Menteri” memiliki derajat persuasi lebih tinggi dibandingkan dengan “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”. Hal ini menunjukkan bahwa posisi bahasa secara persuasif agresif-dogmatis telah memunculkan sebuah pengontrolan sebuah persepsi (PS-4) yang menetapkan kata “Mas Menteri” lebih familiar digunakan dibandingkan “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”, sehingga esensi dalam bentuk pandangan dan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang melekat pada sosok “Mas Menteri”. Secara tidak sadar, kekuasaan dalam bentuk bahasa telah menanamkan kekerasan simbolik pada sebuah wacana dalam ideologi kekuasaan seseorang.

b. Pertarungan Simbolik dan Mode Kebahasaan kata “Dana Indonesiana”

Kata “Dana Indonesiana” telah menjadi label yang diakui secara resmi (PS-1) dan memunculkan monopoli yang sah (PS-2) secara bahasa karena legalitas kepemilikan istilah tersebut dapat terwujud dalam bentuk nyata. Kata tersebut sebelumnya belum pernah terbesit dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Selain Norman Fairclough, pendapat yang dikemukakan oleh Haryatmoko (2003) didukung oleh konsep strategi Bourdieu (2006) merinci varian strategi dominansi menjadi *strategi rekonversi modal* atau peneruan kembali dan *strategi reproduksi*. Penjabaran terhadap strategi Bourdieu tersebut sesungguhnya dipahami sebagai (a) *strategi investasi ekonomi* yang terkait dengan menambah serta mempertahankan modal ekonomi; (b) *strategi investasi biologis*, yakni kontrol pengaturan jumlah keturunan; (c) *strategi investasi simbolik*, mempertahankan dan meningkatkan pengakuan sosial yang didapat; (d) *strategi pendidikan*, yakni praktik yang mengarah pada usaha menghasilkan pelaku sosial yang memiliki keahlian tertentu; (e) *strategi pewarisan*, terkait dengan modal ekonomi yang dipandang sebagai modal yang signifikan dalam arena kekuasaan. Keterangan PS-1 dan PS-2 terhadap kata “Dana Indonesiana” ternyata juga

masuk dalam strategi yang disebutkan oleh Bourdieu. Hal ini terdapat pada ujaran (19) yang masuk pada ranah leksikalisasi (WK-1) yaitu strategi pendidikan dan ekonomi lebih mendominasi dalam kata “Dana Indonesiana”. (Karnanta, 2013)

Selain itu, leksikalisasi kata “Dana Indonesiana” tergolong sebagai kata yang baru dan merupakan istilah yang bersifat persuasif agresif-dogmatif (WK-1) yang tampak pada ujaran (19) dan berpotensi mengandung pengertian tunggal atau kategorisasi, sehingga memunculkan derajat kekuatan persuasi (WK-2) dan sekaligus berperan sebagai pengontrol persepsi masyarakat (PS-4) dalam memahami kata tersebut.

(19) NM: *Iya. Boleh boleh jadi ini “Dana Indonesiana” ini adalah ini hasil perjuangan kita dan KEMENKEU ia bersama untuk bisa menciptakan suatu wadah anggaran yang permanen abadi dan bunga daripada dana tersebut bisa membiayai berbagai macam jenis aktivitas kebudayaan gitu dan agak-agak berbeda Disini sangat fleksibel penggunaannya karena dana Abadi jadinya dia akan terus menambah dana pokoknya dan hasilnya atau hasil bunganya itu setiap tahun akan digunakan untuk mendanai berbagai macam bentuk jadi satu adalah dukungan untuk institusi-institusi jadi bukan Project aja tapi kita bisa mendukung suatu institusi atau misalnya suatu venue Iya kan atau suatu organisasi yang memayungi misalnya organisasi budayawan dan lain-lain.....*

Maksud yang disampaikan oleh NM adalah maksud eksplisit yaitu pandangan ideologi dan kekuasaannya telah nampak secara jelas dan jarang sekali yang membutuhkan penafsiran ganda. Pada ujaran (19) tersebut, NM telah menyebutkan secara runtut bagaimana karya-karya yang memiliki potensi harus didukung terutama dalam hal dana. NM telah menyediakan wadah dana untuk memberikan solusi terkait danayang dialami dalam bidang perfilman. Selain itu, NM juga memberikan sistem yang akan dilakukan dalam menyeleksi peserta agar dana tersebut dapat diberikan berupa dana hibah.



Makna tentang “Dana Indonesiana” merupakan makna implisit yang harus dijelaskan oleh kalimat penjelas. Oleh sebab itu, NM memberikan pengertian yang gamblang terkait pengertian “Dana Indonesiana” secara tidak langsung akan memunculkan pemaksaan pandangan dan tindakan (PS-3) dan mengandung tindak tutur perlokusi untuk mengajak masyarakat mewujudkan “Dana Indonesiana” tersebut.

c. **Pertarungan Simbolik dan Mode Kebahasaan kata “Kurikulum Merdeka”**

Kata “Kurikulum Merdeka” menjadi label bagi gagasan NM setelah berakhirnya kurikulum sebelumnya, seperti KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Kemunculan pengakuan secara istilah tersebut adalah sah (PS-1) dan dipakai oleh seluruh lembaga pendidikan. Tatanan *genoseological* dari konsep argumen Bourdieu juga digunakan dalam proses pelabelan kata tersebut. Meskipun kata “kurikulum” dan “merdeka” digunakan secara terpisah, tapi penggunaan kata tersebut telah menjadi sebuah monopoli visi yang sah (PS-2) hasil pemikiran NM.

Percakapan antara NM dan PL memang hanya sedikit menggunakan kata perbandingan secara frontal karena secara tersirat bahasa yang digunakan lebih merujuk pada sifat keunggulan dari produk sebelumnya. Hal ini tampak seperti pada percakapan (27).

(27) NM: .....*Jadi kita ingin kurikulum kita tuh jauh lebih merdeka untuk bisa mengakomodasi skill-skill yang sangat sulit dites, tapi malah lebih penting daripada yang bisa dites gitu loh untuk masa depan mereka*

Kata ini menggunakan majas metafora dan eufimisme karena menyebutkan kata “lebih merdeka” yang maksudnya bahwa kurikulum ini jauh lebih bagus, fleksibel, tidak mengikat dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan. Hal ini tentu memiliki banyak makna secara implisit di dalamnya, sehingga makna yang mengandung sebuah pemaksaan pandangan dan tindakan (PS-

3) terhadap kata tersebut memiliki derajat kekuatan persuasi (WK-2) yang lebih tinggi dibanding kurikulum sebelumnya serta menjadikan sebuah pengontrolan persepsi masyarakat (PS-4) secara persuasif agresif-dogmatis (WK-1) tentang pengertian kurikulum merdeka tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Gramsci mengacu pada hegemoni untuk menggambarkan tindakan kelompok yang merupakan kekuatan dominan dan progresif (Gramsci, 1971). Dalam hal ini, sistem pendidikan Indonesia memiliki kekuatan progresif atas kurikulum siswa. Bukti ini muncul ketika setiap kali sistem pemerintahan berubah, seperti ketika pemerintahan dan presiden berganti, kurikulum yang ada juga mengubah materi sehingga menyebabkan anomie dalam bidang atau bidang pendidikan, terutama bagi siswa sebagai satu lingkungan pendidikan di Indonesia (Perdana, 2016).

#### 4. KESIMPULAN

Analisis Norman Fairclough dari fitur linguistik proses leksikal kosakata pada aspek deskripsi menunjukkan bahwa Nadiem Makarim memiliki sebuah kekuasaan yang dituangkan dalam sebuah ideologi berkaitan tentang dana pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dari dana tersebut. Ia juga menyampaikan program lanjutan berupa kurikulum merdeka untuk mempermudah akses dana tersebut dapat dicairkan yang diwujudkan dalam bentuk kreativitas masyarakat. Kata “mas menteri” muncul sebanyak 36 kali, kata “dana” muncul sebanyak 22 kali yang merepresentasikan tentang dana anggaran abadi bernama “Dana Indonesiana”, kata “kurikulum” muncul sebanyak 10 kali, kata “merdeka” muncul sebanyak 11 kali. Kata tersebut telah memunculkan empat pertarungan simbolik secara leksikal yang mengandung makna eksperiensial, antara lain (1) kekuatan untuk memberi nama yang diakui secara resmi/pelabelan, (2) monopoli visi yang sah, (3) pemaksaan pandangan dan

tindakan, dan (4) pengontrol persepsi dengan mode wacana kebahasaan yang bercorak persuasif gresif-dogmatis dan persuasif derajat kekuasaan berpotensi mendominasi makna dan maksud komunikasi.

## 5. REFERENSI

- Arifianti, I. (2018). Conventional and Non Conventional implications. *PENA*, 32, 44–52. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/pena/article/view/936/697>
- Fairclough, N. (2013). Language and Power Second edition. In *Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY, 10017, USA* (second). Routledge, Taylor & Francis 1989, 2001.
- Hasanah, A., & Mardikantoro, H. B. (2017). Konstruksi Realitas Seratus Hari Pertama Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di Media Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough Alif. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3, 233–243. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/seloka>
- Hasibuan, I. A., & Khairani, A. I. (2021). Hegemoni Bahasa Milenialisasi Pada Slogan Demonstrasi: Analisis Wacana Kritis. *Konfiks Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(2), 9–16. <https://doi.org/10.26618/konfiks.v7i2.4294>
- Hendrajati, E. (2009). Mode Wacana Bahasa Kekuasaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v2i1.665>
- Jafar, K. (2015). Pada Cerita Wanduindiu. *Linguistika: Buletin Ilmiah Program Magister Linguistik Universitas Udayana*, 22, 154–161. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/linguistika/article/view/14004>
- Karnanta, K. Y. (2013). Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu. *Jurnal Poetika*, 1(1), 3–15.
- Kuntarto, E. (2018). Bahasa Dan Kekuasaan Politik Oposan Di Indonesia: Analisis Wacana KRITIS. *Jurnal Kiprah*, 6(2), 37–47. <https://doi.org/10.31629/kiprah.v6i2.860>
- Mubaligh, A. (2011). Relasi Bahasa Dan Ideologi. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 112–118. <https://doi.org/10.18860/ling.v5i2.622>
- Perdana, D. I. (2016). Kurikulum Dan Pendidikan Di Indonesia Proses Mencari Arah Pendidikan Yang Ideal Di Indonesia atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata? *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23412>
- Santoso, A. (2019). *Panorama Studi Wacana Kritis: Relasi antara Wacana Publik, Ideologi, & Kesadaran Berbahasa Kritis*. Universitas Negeri Malang.
- Sofyan, N. (2014). Bahasa Sebagai Simbolisasi Mempertahankan Kekuasaan. *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 75–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/interaksi.3.1.75-84>
- Sukriyah, S., Sumarlam, S., & Djatmika, D. (2018). Kohesi Leksikal Sinonimi, Antonimi, Dan Repetisi Pada Rubrik Cerita Anak, Cerita Remaja, Dan Cerita Dewasa Dalam Surat Kabar Harian Kompas. *Aksara*, 30(2), 267. <https://doi.org/10.29255/aksara.v30i2.230.267-283>
- Tambunan, P. (2022). *Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Talk Show Mata Najwa “Kontroversi Mas Menteri”* [Universitas Diponegoro]. [http://eprints.undip.ac.id/83934/1/Jurnal\\_Patrici\\_a.pdf](http://eprints.undip.ac.id/83934/1/Jurnal_Patrici_a.pdf)
- Wahyuni, S., Supratno, H., & Kamidjan, K. (2019). Kekerasan Simbolik Dalam Novel Indonesia. *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 12(2), 128. <https://doi.org/10.26858/retorika.v12i2.8833>
- Winarsih, S. (2013). Representasi Bahasa dalam Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan. In *Jurnal Bahasa Lingua Scientia* (Vol. 5, pp. 11–24). [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1238156&val=12545&title=Representasi Bahasa Dalam Pertarungan Simbolik Dan Kekuasaan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1238156&val=12545&title=Representasi%20Bahasa%20Dalam%20Pertarungan%20Simbolik%20Dan%20Kekuasaan)
- Zaim, M. (2014). Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural. *Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural*, 1–123. <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/1830>